

SUFI, S.Sos., M.A.P

STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN



**PADA MASYARAKAT PESISIR
KECAMATAN MUARA BATU**



UNIMAL PRESS

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
PADA MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN
MUARA BATU**



universitas
MALIKUSSALEH

SUFI, S.Sos., M.A.P

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN NELAYAN PADA MASYARAKAT
PESISIR KECAMATAN MUARA BATU**

UNIMAL PRESS

Judul: **STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN PADA MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN MUARA BATU**

x + 62 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Mei, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

SUFI, S.Sos., M.A.P

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

978 – 602 –464- 075-0

ISBN 978-602-464-075-0



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbilalamin, rasa puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, terutama rahmat kesehatan, ilmu pengetahuan, kesempatan sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan Buku ini dengan judul “ Strategi Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Muara Batu yang merupakan salah satu bagian dari tugas Tridarma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan meneliti persoalan yang ada di masyarakat.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herman Fitra, ST., MT, selaku Rektor Universitas Malikussaleh;
2. M. Akmal, S.Sos., MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
3. Al Chaidar, S.IP., M.Si selaku Pimpinan Redaksi UNIMAL Press.
4. Seluruh rekan-rekan Dosen dan Mahasiswa di Program Studi Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang telah ikut menyumbangkan saran serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penyusun.

Demikianlah penyusunan buku ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bukit Indah, Mei 2019
Penyusun,

SUFI, S.Sos., M.AP
NIP. 198209072008121001

This page is intentionally left blank

Daftar Isi

Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	x

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Fokus Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	5

BAB II.....

TINJAUAN PUSTAKA.....

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Strategi.....	8
2.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	9
1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.....	10
2. Program Pembangunan Pedesaan	11
3. Strategi Pembangunan Teknikal - Profesional.....	12
4. Strategi Konflik	13
5. Strategi Pembelotan Kultural.....	13
2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2.2.4 Tujuan Pemberdayaan.....	15
2.2.5 Aspek- aspek Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.2.6 Tahap- tahap Pemberdayaan.....	18
2.2.7 Masyarakat	20
2.2.8 Masyarakat Nelayan	21
1.3 Landasan Konseptual.....	23

BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Pendekatan Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7 Jadwal Penelitian	31
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Keude Bungkaih	33
4.1.2 Visi dan Misi Gampong Keude Bungkaih	34
4.1.3 Kondisi kependudukan gampong keude bungkaih	35
4.2 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	38
4.2.1 Strategi Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan	39
4.3 Hambatan dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan	43
4.3.1 Hambatan Internal	43
4.3.1.1 Jumlah Bantuan dan Anggaran	44
4.3.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	45
4.3.1.3 Kurangnya Pengawasan	47
4.3.2 Hambatan Eksternal	48
4.3.2.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat	48
4.3.2.2 Kurangnya partisipasi Masyarakat	49
4.4. Pembahasan	51
4.4.1. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	51
4.4.1.1. Strategi Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan	51
4.5 Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayan masyarakat Nelayan	53
4.5.1 Hambatan Internal	53
4.5.1.1 Jumlah Bantuan dan Anggaran	53

4.5.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	53
4.5.1.3 Kurangnya pengawasan	54
4.5.2 Hambatan Eksternal	55
4.5.2.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat	55
4.5.1.2 Kurangnya partisipasi Masyarakat	55

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 kesimpulan	57
5.2 saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT PENULIS	62

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Nama-nama Geuchik Bungkaih menurut periode.....	34
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun	36
Tabel 4.3	Data Sumber Penghasilan Tenaga Kerja Dan Tempat Usaha.....	37
Tabel 4.4	Data jumlah penduduk miskin tahun 2015	38

Daftar Gambar

Gambar II.I	Landasan Konseptual.....	23
-------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 10/permen-kp/2014 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi.

Indonesia dengan potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan, terutama masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan (2015), bahwa 121,76 juta orang atau 46 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS 2015), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 35,83 juta orang (15,27 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (62,52 persen) penduduk miskin di Indonesia berada didaerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2015). Berdasarkan jumlah penduduk

miskin yang masih sangat besar sebagaimana yang disebutkan diatas maka sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat Nelayan.

Di lain sisi Indonesia memiliki total luas laut sekitar 3,544 juta km² dan memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya. Diperkirakan pendapatan dari sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun, perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil karena mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut; 0,47 juta nelayan perairan umum; dan 2,65 juta pembudi daya ikan.

Masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Keberadaan masyarakat nelayan sangat dibutuhkan oleh segala sektor karena ikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang setiap saat diperlukan. Perlu penanganan serius dari pemerintah daerah untuk memberdayakan agar mereka dapat hidup layak serta kesehatan mereka dapat terjamin.

Qanun Kabupaten Aceh Utara nomor 4 tahun 2009 tentang pemerintah gampong pasal 156 ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan

pendayagunaan kawasan gampong wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat”.

Wilayah-wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan laut yang menonjol di Aceh Utara antara lain: Kecamatan Seunudon, Dewantara, Syamtalira Bayu, Tanah Pasir, Samudera dan Tanah Jambo Aye, dan Muara Batu. Dari tujuh kecamatan penghasil ikan laut, Muara Batu dan Dewantara merupakan daerah sentral produksi yang utama di samping Syamtalira Bayu.

Kecamatan Muara Batu merupakan salah satu wilayah pesisir yang ada di Aceh Utara dan juga daerah produktif sentral perikanan (ikan laut). Dari 24 gampong yang ada, 12 gampong (desa) terdiri dari desa pesisir, yaitu Pante Gurah,

Keude Mane, Tanoh Anoe, Cot Seurani, Meunasah Lhok, Meunasah Baro, Meunasah Drang, Dakuta, Cot Trueng, Meunasah Aron, Ulee Madon dan Keude Bungkaih dengan jumlah penduduk 16.378 dari 24.368 total penduduk seluruhnya, jumlah penduduk miskin pesisir 2.290 orang, dan jumlah nelayan sebanyak 597 orang.

Pada hakikatnya kehidupan Masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang miskin, hal ini didasari oleh hasil tangkapan laut yang kurang maksimal serta alat tangkap ikan yang kurang memadai dan tempat penjualan atau

tempat pelelangan ikan kurang menjanjikan. Dengan gaji/penghasilan yang masih dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) masyarakat pesisir jika cuaca kurang mendukung para nelayan hanya mendapat Rp 20.000/hari, sedangkan UMK daerah Propinsi Aceh sebesar Rp 2.500.000, jika kita kali kan perhari seharusnya Rp 83.000/hari, masih sangat jauh dari apa yang para nelayan dapatkan perharinya. Ada yang berlayar dengan perahu bukan milik sendiri, dan hasil tangkapannya dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Muara Batu.

Permasalahan-permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih didasari pada pendidikan rata-rata masyarakat yang tamatan SD dan SMP juga skil yang mereka miliki hanya sebatas mencari ikan dengan alat tradisional, modal yang mereka peroleh setiap harinya apabila melaut adalah dari tengkulak,

dan apabila hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, mereka harus berhutang sama tengkulak, dan apabila keesokan harinya mendapat hasil yang sedikit, tengkulak tidak segan-segan untuk langsung memotong hutang kemarin mereka. Sangat disayangkan apabila nelayan tidak mendapatkan ikan yang banyak setiap harinya. Seharusnya pemerintah daerah menyiapkan modal usaha bagi nelayan pada setiap desa, agar masyarakat nelayan tidak bergantung pada tengkulak.

Jenis-jenis program kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di Keude Bungkaih kepada masyarakat nelayan adalah seperti pembagian alat penangkapan ikan pertahun yang diterima bergilir oleh setiap individu atau kelompok nelayan, karena kurangnya bantuan makanya dibagikan secara bergilir, sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan giliran.

Secara umum, tempat pelelangan resmi sangat dibutuhkan oleh para nelayan Gampong Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara karena maraknya tengkulak. Namun demikian fenomena tersebut belum tentu akan sejalan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Studi Gampong Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih?
2. Apa saja hambatan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih. Difokuskan pada jenis bantuan peralatan nelayan.
3. Hambatan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih. Difokuskan pada hambatan internal dan eksternal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Keude Bungkaih.
2. Menjelaskan hambatan yang terjadi dalam upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten aceh utara untuk lebih berupaya dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan referensi atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti masalah mengenai Strategi Pemberdayaan masyarakat nelayan.

*

This page is intentionally left blank

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Mursidah (2016), dengan judul “pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan gompong Pusong kecamatan Banda Sakti”, dengan hasil penelitian bahwa bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas kelautan perikanan dan pertanian (DKPP) diarahkan pada pemberian bantuan kepada nelayan yaitu alat perlengkapan nelayan seperti bot, ancak, nyareng, pukot, piber dan mesin bot. Kendala-kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan gampong Pusong adalah masyarakat pusong yang tidak memanfaatkan barang bantuan, melainkan barang bantuan yang diberikan dijual dengan harga yang terbilang murah, kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah sehingga masyarakat dengan leluasa melakukan aksi jual-beli barang bantuan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian mursidah adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi Perbedaannya adalah penelitian penulis memfokuskan pada peran pemerintah sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

M. Hasan (2005) dengan judul “ pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir” dengan hasil penelitian bahwa proses pemberdayaan masyarakat nelayan gampong jambo mesjid kecamatan blang mangat telah sampai pada tahap evaluasi dimana pada tahun 2001 Dinas kelautan dan perikanan kabupaten aceh utara telah membantu masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan berupa motor mesin, perahu bermotor kecil. Bantuan tersebut diberikan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam bentuk barang siap pakai dengan sebutan hibah.

Persamaan penulis dengan M. Hasan adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi

perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pemberdayaan ekonomi pasca bencana tsunami, sedangkan penulis memfokuskan pada peran pemerintah daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi

Untuk masa sekarang ini tenaga terampil dan terdidik sangat menentukan berperan dalam melakukan strategi dalam suatu usaha. Mereka selain merincikan strategi dalam semua rencananya, mereka melakukan penalaran yang lebih mantap dalam menetapkan strategi apa yang akan dijalankan, usaha apapun yang dilakukan harus memilih dan melihat situasi dan kondisi, serta menilai kedudukan atau posisi suatu usaha.

Dengan demikian strategi harus dapat member gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan dalam menggunakan setiap peluang pada beberapa sasaran. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting dan saling berkaitan, guna dapat berhasilnya kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau badan pemerintahan, yaitu sasaran yang ditunjukkan acuan yang dijalankan untuk sasaran tersebut.

Menurut Assauri (1993: 154) Strategi pada dasarnya adalah suatu rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu pada suatu bidang, yang memberikan pandangan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan yang diinginkan.

Dengan kata lain, strategi adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang member arah kepada usaha-usaha yang ditempuh dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya terutama sebagai tanggapan suatu usaha dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah.

Setiap usaha baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah bertujuan untuk dapat tetap hidup dan berkembang. Tujuan ini dapat diraih melalui upaya mempertahankan dan bahkan meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan hanya dapat diraih bila perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan barang dan jasa yang dijual. Tujuan ini dapat

dicapai melalui penentuan strategi yang tepat dengan cara memanfaatkan berbagai peluang yang terjadi dalam wilayah suatu daerah.

Adapun cara menyusun strategi dilakukan oleh para analis yang selalu memantau dan mengkaji situasi setiap saat. Berdasarkan kajian dan pemantauan tersebut, disusun target, disertai suatu keterangan yang rinci untuk mencapai target tersebut.

Menurut Soekartawi (1998: 49) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu strategi yang diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu pada suatu bidang pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa strategi ini sangat penting Karena merupakan suatu alat yang mampu dipakai untuk mendorong tercapainya target tertentu yang telah digariskan.

2.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan social, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi (Hanna dan Robinson, 1994 dalam Hikmat, 2006 : 54)

1. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformative menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun social seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lama menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang

dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. Program Pembangunan Pedesaan

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan (Sunyoto Usman, 2004). Penjelasan macam-macam program sebagai berikut : Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industry kecil dan kerumahtanggan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi Negara maju.

Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industry kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian.

Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

Selanjutnya Program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternative untuk meningkatkan jarak ideal antara pedesaan dan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran

distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah dengan membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat- sifat seperti kota. Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), mengajukan strategi yang meliputi: (1) Strategi pembangunan gotong-royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal-Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultur. Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai system social. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian- bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

3. Strategi Pembangunan Teknikal - Profesional

Dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara-cara yang lebih kreatif sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

4. Strategi Konflik

Melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

5. Strategi Pembelotan Kultural

Menekankan pada perubahan tingkat subjektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa pancasila adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang kader pemberdayaan masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (enabler), perantara (mediator), pendidik (educator), perencana (planner), advokasi (advocation), aktivis (activist) dan pelaksana teknis (technisi roles) (lihat pasal 10 permendagri RI No.7 Tahun 2007). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan strategi pemabangunan Teknikal- Profesional.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 Km garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta Km² (Berdasarkan konvensi PBB tahun 1982), Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati dan nonhayati yang melimpah (Simanungkalit dalam Resosudarmo, dkk, 2002: 32).

Menurut Yusuf (2003:2) “pemberdayaan sebagai usaha penguatan yang lemah dengan kata lain pemberdayaan adalah usaha penguatan masyarakat yang lemah baik secara ekonomi, politik, dan social budaya”

Sedangkan Mubyarto (1997: 7) menjelaskan pemberdayaan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dari suatu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. “pemberdayaan” terlihat muncul kepada sasaran politis,

sedangkan “peningkatan kemampuan” muncul lebih bersifat netral (nonpolitis), sehingga lebih diterima bagi ahli tenis yang tidak ingin terpengaruh dengan semua yang mungkin dapat memunculkan kecacatan ideology atau politik. Kata “perkuatan” dapat diletakkan pada keduanya.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat local yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisir diri mereka sendiri. (Lucie, 2005)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Kartasasmita, 1996 :144)

Para ahli di atas tidak jauh berbeda dalam memberikan definisi tentang pemberdayaan dimana pemberdayaan adalah dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk mengembangkan potensi yang

ada di masyarakat diarahkan pada perekonomian yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dari setiap anggota masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai cirri, latar belakang, dan budaya tertentu. Sebagai contoh, upaya pemberdayaan pada masyarakat petani tidak sama dengan pemberdayaan pada masyarakat nelayan, walaupun tujuan pemberdayaan adalah sama.

2.2.4 Tujuan Pemberdayaan

Menurut wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 47) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotrik, efektif, dengan mengarahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, psikomotrik, efektif dan konatif) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S, 2004: 80-81)

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang

ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini terlihat pesat kemajuannya. Berbagai jenis kebutuhan manusia telah berkembang dengan berbagai kemudahan, untuk menunjukkan manusia dalam menjalankan kehidupannya, yang ditandai dengan berbagai bentuk dan model kecanggihan teknologi.

Meskipun kemudahan hidup dengan munculnya teknologi baru itu telah menggiring manusia ke arah yang lebih baik, dan sejahtera. Akan tetapi ternyata hanya sebagian kecil saja yang menikmati perkembangan kemajuan teknologi tersebut. Serta masih banyak masyarakat yang bergelimpangan dengan kehidupan tradisional, dan miskin. Karena kemiskinannya sehingga tak mampu menjangkau atau meraih kehidupan modern tersebut.

2.2.5 Aspek- aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengertiannya aspek-aspek pemberdayaan masyarakat adalah bidang-bidang atau unsur-unsur pokok yang menjadi prioritas untuk diberdayakan, bagi suatu organisasi. Tentunya setiap organisasi berbeda-beda tentang prioritas bidang yang akan diberdayakan, umpamanya suatu perusahaan yang bergerak dibidang distributor barang-barang elektronik tentu akan berbeda dengan perusahaan yang bergerak dalam usaha perikanan hasil tangkap. Adapun masalah terpenting yang harus mendapat perhatian dalam usaha pemberdayaan di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bidang pelelangan ikan resmi masyarakat nelayan.

Mubyarto (1994: 7) mengatakan "kekuatan ekonomi terletak pada kemampuannya berswadaya".

Selanjutnya dalam penjelasannya Mubyarto, (1997: 21) mengembangkan aspek pemberdayaan dalam beberapa sector:

1. Pembangunan infrasturktur dengan system dan pola padat karya sebagai pemicu penanggulangan kemiskinan telah berhasil memacu dana dukungan dari berbagai pihak.

2. Kegiatan ekonomi produktif meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, industri dan perdagangan dengan cara bergilir.
3. Kegiatan social kemasyarakatan meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan bidang social budaya lainnya.

Selain hal itu ada juga yang menjadi aspek terpenting dalam pemberdayaan yaitu aspek pembinaan kesejahteraan social, pelatihan dan pendidikan, serta pemberian kredit usaha. Karena apapun usahanya apabila tidak didukung oleh ketiga aspek tersebut maka usaha yang kita berdayakan tidak akan mampu berjalan dengan baik.

Aspek yang menyangkut masalah kesejahteraan social tersebut dalam arti sempit maksudnya adalah yang mengalami masalah kesejahteraan social belum menjurus pada masalah dengan segala kompleksitasnya, masalah tersebut baru merupakan masalah yang terkait dengan masalah lain dalam tindakan-tindakan yang sifatnya saling kait-mengkait, koordinatif dan belum direalisasi dalam penanganannya baik orang yang mengalami masalah yang belum dapat sesuatu kelompok masyarakat ataupun belum adanya suatu kegiatan dan kemampuan secara cepat dan tepat berupa tindakan, semangat para pelaksana pembangunan dibidang kesejahteraan social. Dalam merealisasikan yang dijelaskan adalah keterpaduan kerja sama yang baik antara mitra maupun intra sektoral.

Dari uraian di atas dapat kita jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam 3 aspek yaitu:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui :
 - bantuan dana
 - pembangunan prasarana fisik
 - pembangunan prasarana dan sarana social
 - pengembangan lembaga pendanaan

Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah dalam mecegah persaingan yang tidak seimbang.

Mubyarto, (1997: 21) konsep pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan potensi yang ada pada suatu daerah merupakan langkah tepat dalam mewujudkan sekaligus melaksanakan pembangunan pada suatu daerah.

Melalui perspektif tersebut otonomi berkaitan dengan upaya menggerakkan demokratisasi. Demokratisasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama. Disini demokrasi lebih menekankan pada partisipasi dan artikulasi kepentingan rakyat ke dalam system pemerintah.

2.2.6 Tahap- tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodingningrat (2004: 41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan

dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. (Ambar Teguh S, 2004: 82-83)

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang lebih banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literature didunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di akaopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternative pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradig baru pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradig baru pembangunan, yakni yang bersifat "partisipasi (participacy), pemberdayaan (empowering), dan berkelanjutan (sustainable)" (Chambers, 1995 dalam kartasamita, 1996)

2.2.7 Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Society. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Sementara menurut Koertjaraningrat (2000: 46) “ masyarakat adalah kesatuan hidup, manusia yang berinteraksi, menurut suatu system, adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Dikaitkan dengan tempatnya, masyarakat mengacu pada desa, kecamatan, kota yang memiliki pola kehidupan masing-masing. Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat-istiadat yang turut mewarnai system pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. (februana, 2008: 30)

Menurut Paul B. Horton, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pada bagian lain, Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. (Zarifah, 2013)

Menurut Para Ahli :

1. Peter L. Berger

Definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.

2. Mansur Fakih

Masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (equilibrium) dan harmoni.

3. Marx

Masyarakat ialah keseluruhan hubungan - hubungan ekonomis, baik produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni teknik dan karya.

4. Gillin & Gillin

Masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

5. Harold J. Laski

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

6. Horton & Hunt

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan.

Dari kesemua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

2.2.8 Masyarakat Nelayan

Pada dasarnya istilah masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan penyebutan masyarakat nelayan, hal ini disebabkan karena mayoritas dari pekerjaan masyarakat pesisir adalah nelayan. Adapun pengertian dari nelayan sebagaimana didefinisikan oleh Dirjen Perikanan (Kusnadi, 2006:2), yang disebut nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan sebagian atau seluruh hasilnya

untuk dijual. Terkadang masyarakat pesisir (Costal Community) juga diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, biasanya berupa perahu dengan sistem ekonomi yang hirarki seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2005:143).

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka dilaut. Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. (Suharto, 2005)

Dari berbagai masalah nelayan, menurut Kusnadi (2008) terdapat 5 masalah pokok, antara lain :

1. Kondisi alam

Kompleksnya permasalahan pada masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

2. Tingkat pendidikan nelayan

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas tangkapannya juga rendah.

3. Pola kehidupan nelayan

Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan penceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.

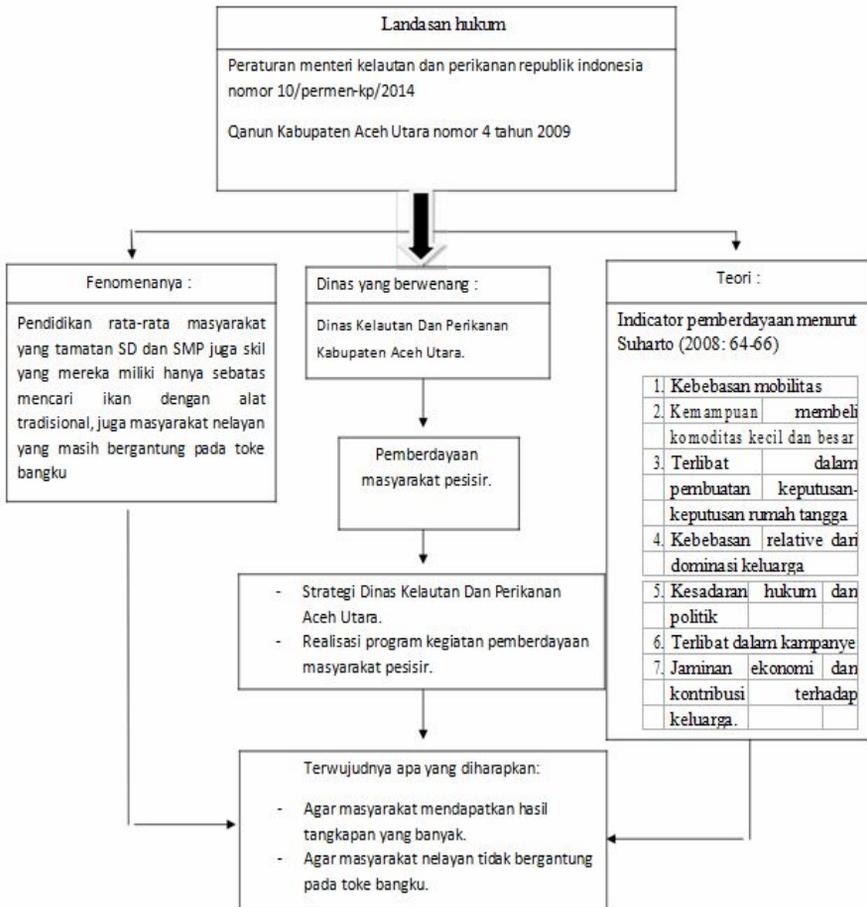
4. Pemasaran hasil tangkapan

Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga dibawah harga pasar.

5. Program pemerintah yang belum memihak pada masyarakat nelayan.

1.3 Landasan Konseptual

Gambar II.I
Landasan Konseptual



Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara pasal 156 ayat (2) tahun 2009 tentang: Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan gampong wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka kita dapat mengambil sat kesimpulan bahwa : setiap qanun dan ketentuan yang dikeluarkan tentunya sangat berdampak positif pada masyarakat agar masyarakat bisa diikutsertakan dalam setiap pembangunan serta mendapat kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini sangatlah mendukung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa untuk menindak lanjuti setiap sector pembangunan yang ada di desa, tentunya masyarakat harus diberdayakan agar masyarakat bisa memaklumi begitu penting pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi kebiasaan yang sudah terjadi yaitu ekonomi masyarakat nelayan dipermainkan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai toke bangku atau pemilik modal, ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat nelayan untuk mempermainkan harga hasil tangkapan sehingga pihak nelayan di desa keude bungkaih merasa sangat dirugikan, untuk menghapus kultur atau kebiasaan yang terjadi dilapangan ini bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan karena ekonomi masyarakat nelayan sangat tergantung pada toke bangku baik untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu pendampingan dari pihak pemerintah maupun dinas kelautan dan perikanan kabupaten Aceh Utara untuk mengubah fenomena yang berkembang ditengah-tengah masyarakat nelayan.

Menurut Edi Suharto (2008) mengembangkan beberapa indicator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan menjelaskan ada beberapa indicator:

1. Kebebasan mobilitas

Kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah

ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (sabun mandi, sampo, bedak, rokok). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membelu barang-barang tersebut menggunakan uang sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar

Kekmampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator di atas poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa izin dari pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama istri/suami mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.

5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga

Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnnya, atau melarang bekerja diluar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik

Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

Seseorang di anggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan social, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Ikut serta pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat adalah Rencana program pemberdayaan masyarakat nelayan dan Realisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan agar masyarakat bisa mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan para nelayan tidak bergantung lagi pada toke bangku.

*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam Penelitian ini adalah di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Muara Batu dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan karena Kecamatan Muara Batu merupakan kecamatan yang penduduknya sebagian bekerja sebagai nelayan dan tinggal didaerah pesisir. Penulis melihat fenomena kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin pesisir, hal itu terlihat dari tidak adanya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat pesisir berdasarkan hasil observasi awal penulis.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif analisis, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam. Hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian.

Menurut Restu (2010: 84), metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Menurut Sumadi (2009:75), tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Ciri- ciri penelitian deskriptif ada 2 :

1. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
2. Tujuan penelitian-penelitian survey :
 1. Untuk mencari informasi factual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.
 2. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan paktek-praktek yang sudah berlangsung.
 3. Untuk membuat komparasi dan evaluasi.
 4. Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan dimasa depan.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang- orang yang dapat memberi informasi atau data terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling.

Menurut Herdiansyah (2010: 106), Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana orang yang dipilih dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Fitri Rosnita S.Pi selaku Kabag Perikanan dan Kelautan
2. Bapak Azizi selaku Staf Camat Muara Batu
3. Bapak Safrizal selaku Staf Dinas Sosial
4. Bapak Hasanuddin selaku Keuchik Gampong Keude Bungkaih

5. Sayed Muhammad selaku Panglima Laot Keude Bungkaih
6. Nelayan

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Data primer: adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Husein, 2005 :42)
2. Data sekunder: adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. (Husein, 2005 :42)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Husein (2005 :51), observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung atau pun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Menurut Restu (2010: 237) observasi non partisipan adalah ketika seorang peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas group, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Ini berarti bahwa peneliti mengamati sendiri ketempat kejadian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sesuai.

2. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksananya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. (Husein, 2005: 51) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tak-terstruktur yaitu suatu teknik wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan informan dengan tidak menggunakan panduan wawancara. Wawancara tak-terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis kepada beberapa orang informan. (Restu, 2010 :241)

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yaitu pengumpulan data melalui dokumen pribadi dan dokumen resmi seperti buku, arsip, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, koran dan data lainnya yang diperlukan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam suatu penelitian. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Proses analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis versi Miles dan Huberman dalam buku Husein (2009: 85), dapat ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Penyajian data, adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, adalah kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

3.7 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal beserta rangkaian kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung dalam beberapa tahap, seperti yang disajikan dalam tabel penelitian berikut ini.

Tabel 3.1

Tahap 1	Kegiatan	Bulan/tahun 2017-2018										
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	
I	Persiapan penelitian	■										
II	Pengumpulan data	■										
	Penyusunan proposal		■	■	■							
	Seminar judul					■						
	Cetak proposal					■						
III	Penelitian lapangan						■					
	Pengolahan data						■	■				
	Analisis data							■	■	■		
IV	Ujian skripsi (sidang)											■
	Pengadaan skripsi											■

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Gampong Keude Bungkaih

Gampong Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu merupakan sebuah gampong yang letaknya paling ujung dari ibu kota kecamatan yaitu sekitar $\pm 0,7$ Km, Sejak dahulu kala Gampong Keude Bungkaih sudah ada.

Gampong Keude Bungkaih Merupakan salah satu gampong dari 24 gampong yang terletak di Kecamatan Muara Batu Dan berada dalam Kemukiman Bungkaih. Jumlah penduduk Gampong Keude Bungkaih pada akhir tahun 2015 yaitu 1882 jiwa, dengan jumlah laki-laki 934 jiwa dan perempuan 948 jiwa, yang keseluruhan mencakup dalam 435 Kepala Keluarga (KK) dan tersebar dalam tiga dusun yaitu Dusun Keude, Dusun Teungoh dan Dusun Pasi. Jarak gampong dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 0,7 Km dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara 50 Km dengan luas 307 Ha.

Saat ini nelayan dan Pertanian belum memiliki sarana prasarana untuk menunjang peningkatan produktifitas Nelayan dan pertanian. Sarana dan prasarana penunjang ini merupakan pondasi awal untuk menata perekonomian masyarakat gampong menuju ke arah pembangunan yang lebih baik.

Tabel 4.1
Nama-nama Geuchik Bungkaih menurut periode

NO	PERIODE	NAMA GEUCHIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1945 –1953	Abu Hasan	Almarhum
2	1953 –1958	M. Hasan	Almarhum
3	1958 –1978	Idris Musa	Almarhum
4	1978 –1983	Abdullah M. Hasan	Almarhum
5	1983 –1988	H. Nawawi H. Hanafiah	Almarhum
6	1988 –1994	Murdani Usman	Almarhum
7	1994 –2005	Zainuddin Yahya	Masih Hidup
8	2005 –2011	Iskandar Hanafiah	Masih Hidup
9	2011 –2017	Hasanuddin Is	Masih Hidup

(Sumber: Kantor Guchik)

4.1.2 Visi dan Misi Gampong Keude Bungkaih

1. Visi

Visi adalah sebagai Pandangan masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah gampong, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Gampong dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi gampong yang diinginkan. Visi gampong

juga disesuaikan dengan visi Geuchik Gampong yang sedang menjabat sebagai kepala Pemerintah Gampong.

Adapun visi Gampong Keude Bungkaih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa, Serta Efektif Dalam Menata Ketentraman Sehingga Administrasi Dan Perekonomian Masyarakat Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Berkeseimbangan”

2. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Gampong yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa Gampong kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh Pemerintah Gampong. Untuk mewujudkan visi Gampong tersebut diatas, maka Pemerintah Gampong Keude Bungkaih menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Mengefektifkan Pusat Administrasi Dan Pemerintahan Di Kantor Geuchik.
2. Memperkuat Kerjasama Antar Lembaga Dalam Mengembangkan Gampong Keude Bungkaih Ke Arah Kebersamaan Dalam Musyawarah Dan Mufakat.
3. Mengupayakan Pemberdayaan Sumber Daya Gampong (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Gampong Untuk Selalu Dapat Berkontribusi Demi Kemajuan Gampong Keude Bungkaih.

4.1.3 Kondisi kependudukan gampong keude bungkaih

Berikut jumlah penduduk gampong keude bungkaih menurut jurong/ dusun.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6
1	Dusun Keude	126	257	288	545
2	Dusun Teungoh	175	399	367	766
3	Dusun Pasi	134	278	293	571
TOTAL		435	934	948	1882

(Sumber: kantor geuchik)

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk 1882 jiwa yang terdiri dari Dusun Keude, Dusun Teungeh, Dusun pasi.

Tabel 4.3
Data Sumber Penghasilan Tenaga Kerja Dan Tempat Usaha

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	927	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	907	Jiwa
	c. Jumlah keluarga		Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	215	Jiwa
	b. Pertambangan dan penggalian	-	-
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	31	Jiwa
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	80	Jiwa
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	67	Jiwa
	f. Jasa	107	Jiwa
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	37	Jiwa
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	63	Jiwa
	b. Lulusan SMA	106	Jiwa
	c. Lulusan SMP	75	Jiwa
	d. Lulusan SD	161	Jiwa
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	16	Jiwa

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa jumlah penduduk pria 927 jiwa dan perempuan 907 jiwa, sumber penghasilan dominan di keude bungkaih adalah pertanian,

perikanan, perkebunan, sedangkan industri, perdagangan, angkutan, pegudangan, komunikasi dan jasa hanya setengah dari pertanian dan perkebunan. Kemudian melihat dari latar pendidikan masyarakat keude bungkaih kebanyakan dari kalangan SMA hanya sebagian yang lulusan sarjana selebihnya masih sekolah dasar dan menengah pertama.

Tabel 4.4
Data jumlah penduduk miskin tahun 2015

NO	DUSUN	FAKIR	MISKIN	DHUAFA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dusun Keude	12	14	6	32	KK
2	Dusun Teuhgoh	19	24	18	61	KK
3	Dusun Pasi	19	31	22	72	KK
	JUMLAH	50	69	46	165	KK

(Sumber: Kantor Geuchik Tahun 2018)

Berdasarkan tabel 4.4 data penduduk miskin tahun 2015 berjumlah 69 kk, untuk fakir miskin berjumlah 50 kk dan dhuafa berjumlah 46 kk jadi bisa disimpulkan berdasarkan tabel bahwa di Gampong Keude Bungkaih dominan masyarakat miskin.

4.2 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Pada masa sekarang ini tenaga terampil dan terdidik sangat menentukan berperan dalam melakukan strategi dalam suatu usaha. Mereka selain merincikan strategi dalam semua rencananya, mereka melakukan penalaran yang lebih mantap dalam menetapkan strategi

apa yang akan dijalankan, usaha apapun yang dilakukan harus memilih dan melihat situasi dan kondisi, serta menilai kedudukan atau posisi suatu usaha.

Strategi pada dasarnya adalah suatu rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu pada suatu bidang, yang memberikan pandangan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Strategi harus dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan dalam menggunakan setiap peluang pada beberapa sasaran. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting dan saling berkaitan, guna dapat berhasilnya kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau badan pemerintahan, yaitu sasaran yang ditunjukkan acuan yang dijalankan untuk sasaran tersebut.

Dengan kata lain, strategi adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha yang ditempuh dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya terutama sebagai tanggapan suatu usaha dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah.

4.2.1 Strategi Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan

Alat tangkap adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya, alat tangkap ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu, kail, benang pancing, pemberat, batang pancing, roda pancing, umpan, indikator gigitan, tombak, jaring ikan, jebakan ikan. Pemberian alat tangkap dan boat sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan, karena alat pancing sendiri merupakan hal pokok yang utama yang dibutuhkan para nelayan setelah boat. Alat tangkap juga sangat diperlukan untuk meningkatkan keuntungan para nelayan, dan alat tangkap yang di berikan harus bisa di manfaatkan semaksimal mungkin oleh para nelayan tersebut sehingga hasil yang didapatkannya juga menjadi maksimal.

Bantuan yang didapatkan oleh para nelayan yaitu berasal dari Dinas Provinsi Pusat untuk Program Asuransi Nelayan. Bantuan yang di berikan kepada nelayan tidak hanya untuk satu Gampong saja dan

yang akan mendapatkan bantuan alat tangkap dan boat akan bergilir untuk semua nelayan akan mendapatkan bantuan, hanya saja harus sabar menunggu ketika gilirannya. Kemudian pula bantuan yang didapatkan melalui syarat yaitu dengan mengajukan proposal dan harus berkelompok dengan jumlah yang ditentukan oleh mereka sendiri.

Strategi Dinas Kelautan dalam memberikan bantuan hanya dikhususkan kepada para nelayan saja, tahap pemberian bantuan tidak perseorangan tapi berkelompok, ketika ada berita adanya bantuan maka salah satu ketua penerima bantuan akan memilih nelayan yang layak mendapatkan bantuan tersebut, setelah itu barulah nelayan diharuskan membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dinas akan memproses dana bantuan yang akan diberikan kepada para nelayan, sebelum pencairan dana di adakan sosialisasi untuk penggunaan bahan yang di berikan, sosialisasi hanya dilakukan sekali sebelum penerimaan bantuan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri Rosnita , S.Pi selaku petugas Dinas Kelautan dan Perikanan beliau mengatakan bahwa :

“..... sejauh ini tidak ada strategi yang khusus untuk memberdayakan nelayan, akan tetapi dari kita memberikan bantuan untuk para nelayan berupa alat tangkap dan memberikan Boat untuk nelayan tersebut, selain itu untuk bantuan berupa alat tangkap dan Boat itu diberikan bergilir, semua nelayan mendapatkan bantuan tidak hanya berpatokan satu Gampong saja atau nelayan yang itu itu saja yang mendapatkan bantuan dari kami dan sifat bantuan yang kami berikan bersifat ghibah, menjadi hak sepenuhnya untuk para nelayan tersebut. Kemudian pada tahun 2016 kita memberikan pancing untuk seluruh nelayan.” (Wawancara, 12 April 2018).

Dari wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemberian alat bantuan dan boat tidak berpatok pada satu gampong saja dan bantuan yang diberikan bersifat hibah.

Kemudian selanjutnya dari Bapak Azizi selaku staf Pemberdayaan Masyarakat Desa beliau mengatakan bahwa :

“..... untuk para nelayan yang ingin mendapatkan bantuan berupa Boat dan Alat Tangkap mereka harus mengajukan

proposal yang akan langsung di kirim ke pusat dan selain itu tidak ada syarat lainnya untuk mendapatkan bantuan hanya saja mereka harus membentuk kelompok, nah satu kelompok tersebutlah akan diberikan 6 boat dan beberapa alat tangkap, sebenarnya kita hanya membantu pemberdayaan dari luar saja , yaitu dengan memberikan fasilitas, kita menginginkan para nelayan yang tidak bisa membeli alat tagkap dan masih bergantung kepada para toke bangku bisa mandiri dengan adanya boat sendiri dan kemudian bisa meningkatkan pendapatan mereka juga “ (Wawancara 12 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan bantuan para nelayan harus mengajukan proposal yang sebelumnya telah dibentuk anggota kelompok kerja. Peneliti juga mewawancarai Bapak Safrizal selaku staf Dinas Sosial beliau mengatakan bahwa :

“..... untuk bantuan yang diberikan kita menginformasikan kepada ketua penerima bantuan atau panglima laot untuk di seleksi di gampong siapa saja yang pantas mendapatkan bantuan, saya hanya menerima proposal dari nelayan yang kemudian saya teruskan untuk proses pencairan dana kepada masyarakat nelayan.(Wawancara 15 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat kita lihat bahwa pemberian alat tangkap dan boat tidak mempunyai syarat khusus untuk mendapatkannya yaitu hanya dengan cara membentuk kelompok dan mengajukan proposal dan sifat bantuan yang di berikan yaitu ghibah, tidak dikembalikan lagi karena itu untuk digunakan seterusnya kepada para nelayan yang membutuhkannya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Bahraini selaku penerima bantuan, beliau mengatakan bahwa :

“..... proses mendapatkan bantuan yang pertama adanya staf dari dinas yang menginformasikan bahwa adanya bantuan untuk para nelayan dan saya ditugaskan untuk memilih siapa saja yang pantas dan yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, kemudian baru di informasikan kepada nelayan untuk membuat proposal dan membentuk kelompok penerimaan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan yang di berikan cenderung lebih sedikit, biasanya mereka hanya meminta 2 kelompok atau 3 kelompok sehingga masih banyak

nelayan lain yang tidak mendapatkannya.(Wawancara 15 April 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Marwan selaku Nelayan, Beliau mengatakan bahwa :

“..... memang benar kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi hanya berupa alat tangkap dan boat saja, tidak ada bantuan lainnya selain itu, dan itu kami dapatkan setelah membuat proposal dan diajukan barulah mendapatkan bantuan “ (Wawancara, 15 April

2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa para nelayan hanya mendapatkan bantuan berupa alat tangkap dan boat saja dengan syarat membuat proposal.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Sayed Munzalil selaku Nelayan Beliau mengatakan bahwa :

“..... selama ini saya hanya mendapatkan bantuan berupa alat memancing saja dan boat untuk perkolompok bukan untuk individu, dan setelah mendapatkan bantuan tersebut bisa membantu kami dalam menangkap ikan, kami dari pihak nelayan juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan lainnya untuk kami tidak hanya berupa alat tangkap dan boat saja “ (Wawancara 15 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa para nelayan tidak hanya membutuhkan alat tangkap dan boat saja, akan tetapi mereka juga menginginkan bantuan lain agar bisa membantu mereka dalam mensejahterakan hidupnya.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Rahmat selaku nelayan beliau mengatakan bahwa :

“..... saya hanya mendapatkan alat pancing dari pemerintah karena profesi saya, selain itu tidak mendapatkan apapun dan saya mendapatkan bantuan tersebut hanya satu kali “ (Wawancara 15 April 2018).

Dari hasil wawancara bisa diketahui bahwa pemberian bantuan diberikan oleh pemerintah hanya berdasarkan profesi yang digeluti oleh nelayan, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Razali selaku nelayan beliau mengatakan bahwa :

“..... bantuan yang saya dapatkan dari pemerintah hanya jaring karena saya bukan nelayan untuk boat besar, saya hanya punya sampan maka bantuan yang saya dapatkan hanya jaring” Wawancara 15 April 2018).

Sejauh ini tidak ada strategi lain dari pemerintah, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Hasanuddin selaku Geuchik Gampong Keude Bungkah:

“..... benar adanya bahwa nelayan mendapatkan bantuan berupa boat dan alat tangkap kemudian juga adanya pemberian alat pancing untuk semua nelayan dari pemerintah dan bantuan yang di dapatkan hanya sekali saja , tentunya dengan adanya bantuan seperti itu sangat membantu nelayan yang menengah ke bawah untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memiliki boat sendiri, dan saya selaku Geuchik mengharapkan pemerintah juga memberikan bantuan berupa modal usaha karna mereka juga selain membutuhkan alat pancing dan boat mereka juga membutuhkan modal” (Wawancara 15 April 2018)

Adapun dari hasil wawancara di atas bahwa tidak ada strategi yang khusus untuk pemberdayaan nelayan miskin, hanya saja berupa pemberian alat tangkap dan boat. Bantuan ini sendiri sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan dan dengan adanya boat tersendiri juga membantu mereka dalam mendapatkan keuntungan karena tidak perlu bergantung kepada Toke Bangku. Faktanya masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan pancing yang tidak bagus dan baik.

4.3. Hambatan dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan

4.3.1 Hambatan Internal

4.3.1.1 Jumlah Bantuan dan Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi dimasa yang akan datang. seluruh kegiatan perusahaan/instansi untuk jangka waktu tertentu. Salah satu hambatan internal dari pemerintah yaitu kurangnya anggaran yang diberikan, anggaran yang diberikan cenderung sedikit sehingga tidak semua nelayan mendapatkannya, hanya nelayan yang terpilih saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Anggaran yang disalurkan untuk masyarakat tidak berupa uang akan tetapi berupa bahan dan alat pancing, sehingga masyarakat hanya menerima bantuan berupa benda. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hasanuddin selaku Geuchik Gampong Keude Bungkaih, beliau mengatakan bahwa :

“..... selama ini bantuan yang diberikan sangat terbatas, masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan dan masih banyak nelayan yang belum mandiri, anggaran yang diberikan kepada nelayan berupa perlengkapan tidak bisa dibagikan dengan rata, hanya kelompok-kelompok yang terpilih saja yang bisa mendapatkan bantuan, dan kita tidak bisa memprediksikan kapan bantuan tersebut akan disalurkan kembali, masih banyak nelayan yang belum layak yang tidak mendapatkan bantuan, dan bantuan yang diberikan selama ini langsung berupa benda bukan uang.’ (Wawancara 15 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah karena masih banyak nelayan yang belum sejahtera.

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Bahraini selaku ketua kelompok Penerima bantuan, beliau mengatakan bahwa :

“..... bantuan yang diberikan sangat terbatas, dari pemerintah memberikan patokan-patokan tertentu seperti hanya menerima dua kelompok dengan jumlah orang sebagian, saya juga harus memilih nelayan mana saja yang bisa yang layak mendapatkan bantuan tersebut, karena tidak semua nelayan bisa mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian bantuan yang diberikan bukan kualitas yang bagus tapi kualitas yang minim. Kami pernah meminta

dengan merk yang bagus akan tetapi ketika sudah ada barangnya yang kami terima itu bahan yang tidak bagus tidak seperti yang kami inginkan.” (Wawancara 15 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan masih sangat kurang dan bantuan yang diberikan bukan kualitas yang bagus akan tetapi dengan kualitas rendah. Selanjutnya penulis melakukan wawacara dengan Bapak azizi selaku staf pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“..... anggaran yang disalurkan memang tidak bisa menyeluruh dikarenakan dana yang tidak cukup untuk nelayan, karena bisa dilihat bahwa nelayan tidak hanya di kec. Muara Batu saja, akan tetapi dari dinas melihat dan merangkul semua nelayan yang ada di Aceh Utara, maka dana yang di salurkan hanya untuk nelayan yang layak mendapatkannya dan kedepannya semoga semua nelayan mendapatkan modal usaha dari pemerintah karena bantuan tersebut akan di berikan secara bergilir.(Wawancara 17 April 2018)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu nelayan Bapak Sayed Munzalil Beliau mengtakan bahwa :

“..... bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan merek yang kami inginkan tapi merek yang lebih murah dari itu. Dan juga waktu kami mengajukan proposal di minta alat pancing dengan ukuran kecil tapi yang diberikan malah ukuran yang susah untuk saya gunakan untuk menangkap ikan, tapi kami tidak melakukan protes apapun kami menerima dan kami gunakan bantuan tersebut” (wawancara 15 April)

Dari hasil wawacara diatas maka bisa dilihat bahwa sangat minim anggaran yang disalurkan kepada nelayan, masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, banyak nelayan yang belum tersentuh dan sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk bisa berkembang mandiri.

4.3.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik instansi maupun perusahaan pada hakikatnya, sumber daya manusia

berupa manusia yang diperkerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Salah satu hambatan yang terjadi yaitu sumber daya manusia yang ada untuk pengawasan lapangan yang dilakukan oleh instansi tersebut . Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Fitri Rosnita selaku petugas Dinas Kelautan dan Perikanan, Beliau mengatakan bahwa :

“..... untuk sumberdaya manusia bagian penyaluran dana bantuan sendiri tidak banyak staf yang bekerja di bagian tersebut, hanya ada staf yang mengatur bagian pencairan bantuan dan staf yang melakukan perekrutan nelayan yang akan mendapatkan modal usaha, dan untuk sosialisasi dari tim kantor yang terjun langsung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan itu hanya bisa dilakukan sekali saja dikarenakan kurangnya staf yang ada dibagian tersebut, apabila staf bagian kantor yang terjun kelapangan maka tidak ada yang mengatur bagian pendanaan dan bagian lain yang harus dikerjakan, maka kami sangat berfokus kepada pemberian bantuan saja tidak menyinggung ke hal lain seperti pengawasan”. (Wawancara 17 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa minimnya sumber daya manusia dari bagian penyaluran dana bantuan sehingga untuk melakukan sosialisasi dan mekanisme pembagian bantuan harus staf yang bekerja dibagian pencairan bantuan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak azizi selaku staf Pemberdayaan Masyarakat, Beliau mengatakan bahwa:

“..... untuk Sumber Daya Manusia (SDM) memang sangat kurang sehingga kami tidak melakukan pengawasan dan sosialisasi yang berkelanjutan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di bagian penyaluran bantuan”. (Wawancara 17 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sangat kurangnya sumber daya Manusia (SDM) sehingga tidak adanya pengawasan yang khusus bagi para nelayan yang sudah mendapatkan bantuan, hanya pada proses memberikan bantuan.

4.3.1.3 Kurangnya Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, pengawasan juga proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam menjalankan tugasnya dinas kelautan memiliki hambatan dalam melakukan pengawasan kepada para nelayan yang mendapatkan bantuan boat dan alat tangkap. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Fitri Rostina S.Pi selaku petugas Dinas Kelautan dan Perikanan, Beliau mengatakan bahwa :

“..... setelah menyalurkan bantuan kepada nelayan dari pihak kami tidak melakukan pengawasan kembali, hanya memberikan bantuan saja, dan dari TIM hanya sesekali melihat perkembangan para nelayan yang sudah mendapatkan bantuan tersebut, tetapi tidak adanya pengawasan khusus atau berlanjut” (wawancara 15 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak dinas kelautan hanya sesekali saja melihat perkembangan dari nelayan penerima bantuan, dan tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Azizi selaku staf Pemberdayaan Masyarakat Desa Beliau mengatakan bahwa :

“..... untuk pengawasan dari pihak dinas kelautan memang sangat minim hampir dikatakan tidak melakukan pengawasan untuk para nelayan yang sudah mendapatkan bantuan, karena setelah diberikan bantuan maka pihak nelayan yang harus bisa berkembang mandiri “(wawancara 15 April 2018)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah hanya bertugas memberikan bantuan selanjutnya pemerintah memberikan wewenang penuh kepada para nelayan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Marwan selaku nelayan beliau mengatakan bahwa :

“..... selama saya mendapatkan bantuan tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah, saya hanya mendapatkan bantuan boat dan alat tangkap saja dan bantuan yang saya dapatkan dan nelayan lainnya hanya satu kali dalam setahun sehingga tidak bisa meningkatkan pendapatan saya “ (wawancara 15 April 2018).

Dari wawancara diatas maka dapat kita lihat bahwa tidak adanya pengawasan yang khusus dilakukan oleh pihak dinas kelautan, hanya pemberian bantuan boat dan alat tangkap.

4.3.2 Hambatan Eksternal

4.3.2.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran sama artinya dengan mawas diri, kesadaran juga diartikan sebagai kondisi dimana individu memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun eksternal. Hal ini disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Fitri Rosnita S.Pi selaku petugas Dinas Kelautan dan Perikanan, beliau mengatakan bahwa :

“..... kita hanya membantu para nelayan untuk berkembang menjadi lebih baik dalam segi peningkatan baik dalam hasil tangkapan maupun dari keuntungan laba yang di dapatkan, tapi disini untuk mewujudkan itu semuanya kita sangat membutuhkan adanya kesadaran masyarakat, karena hal yang selalu kami hadapi yaitu para nelayan tersebut menjual bantuan yang kami berikan dan hasil uang yang di dapatkan akan di bagikan untuk kelompok penerima bantuan, dan tidak ada yang di dapat oleh para nelayan setelah kami berikan bantuan seperti ini, padahal bantuan diberikan kepada mereka dengan mengharapkan perkembangan yang besar kedepannya, itu adalah salah satu kendala besar yang kami hadapi dari para nelayan” (Wawancara 12 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa banyak nelayan yang melakukan curang dengan cara menjual hasil bantuan yang diberikan untuk uangnya dibagi sma rata dengan penerima bantuan lainnya, maka tidak akan terberdaya apabila hal tersebut terus berlanjut.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Azizi selaku Staf Pemberdayaan Masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“..... sejauh ini kendala yang kami hadapi yaitu dari masyarakatnya sendiri, karena kami telah memberikan bantuan berupa boat dan alat tangkap tetapi tidak dipergunakan dengan baik bahkan dijual untuk mendapatkan uang yang sama rata, sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kami dan hal ini sering terjadi dan sulit di ubah dari masyarakat sendiri, makanya sangat perlunya pemikiran yang baik pemikiran yang luas dari para nelayan supaya keinginan pemerintah dalam memberdayakan Nelayan bisa tercapai.” (Wawancara 12 April 2018)

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sayed Muhammad selaku Wakil Panglima Laot, beliau mengatakan bahwa :

“ sebenarnya bukannya ingin menjual, akan tetapi karena alat tangkap yang diberikan tidak banyak dan tidak cukup untuk kami bagi dalam satu kelompok, begitu pula dengan boat yang diberikan, makanya kami menjual dan hasil penjualan tersebut kami bagikan satu kelompok yang mendapatkan bantuan tersebut, kemudian juga alat tangkap yang diberikan mudah rusak dalam jangka waktu satu tahun.” (Wawancara 15 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka kita mengetahui bahwa kesadaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap berkembangnya nelayan tersebut, karena apabila pemerintah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat tapi tidak dipergunakan dengan baik maka kembali lagi ke masyarakatnya yang tidak ingin berkembang .

4.3.2.2 Kurangnya partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarkat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok. Salah satu

hambatan lainnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, sebenarnya bukan masyarakat yang enggan berpartisipasi akan tetapi tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dikarenakan setiap adanya bantuan yang akan disalurkan maka tidak semua masyarakat bisa berpartisipasi karena pengajuan proposal dibatasi dan dipilih kelayakannya untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Bapak bahraini selaku penerima bantuan untuk nelayan, beliau mengatakan bahwa:

“..... untuk partisipasi memang sabenarnya sangat kuat dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tapi kenyataannya dana yang kurang sehingga masyarakat nelayan banyak yang tidak berpartisipasi bukannya tidak mau tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi” (Wawancara 17 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya partisipasi dari masyarakat sangat kuat, akan tetapi kuota yang diberikan dari pemerintah sangat minim makanya masrakat tidak bisa ikut berpartisipasi.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sayed Muhammad selaku Wakil Panglima Laot, Beliau mengatakan bahwa :

“..... sebena nya kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena bantuan yang diberikan sangat terbatas seperti bantuan yang diberikan hanya sekian orang, dan nelayan yang ingin berpartisipasi tidak bisa ikut karena terbatas, hal tersebut sangat mengakibatkan kepada masyarakat nelayan banyak yang masih belum berkembang, contohnya nelayan hanya mendapatkan alat pancing tidak punya boat dan akhirnya harus bergantung lagi kepada para toke bangku”(Wawancara 17 April 2018).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hery selaku nelayan yang belum mendapatkan bantuan :

“..... saya sangat ingin mengajukan proposal dan ikut serta , akan tetapi kuota yang ada sangat terbatas dan hanya nelayan yang dipilih yang bisa mengajukan proposal bantuan.” (Wawancara 17 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa nelayan yang terpilihlah saja yang bisa ikut berpartisipasi.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Hasanuddin selaku Guchik Gampong Kuede Bungkaih, beliau mengatakan bahwa :

“..... banyak nelayan yang ingin berpartisipasi dalam mendapatkan bantuan tersebut, tetapi permintaan yang terbatas membuat para nelayan tidak bisa berpartisipasi semuanya”

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa masih banyak nelayan yang tidak bisa berpartisipasi tetapi mereka tidak bisa ikut berpartisipasi karena sangat minimnya kuota yang diberikan oleh pemerintah, sehingga yang bisa berpartisipasi hanya orang yang terpilih saja setiap tahun.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Salah satu indikator keberhasilan sebuah strategi adalah pencapaian tujuan yang telah direncanakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejauh ini strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam memberdayakan para nelayan miskin sudah baik, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan yang terus-menerus. Tetapi pihak pemerintah harus lebih menekankan lagi dalam memilih strategi yang akan digunakan untuk memberdayakan para nelayan, karna banyak didapati bahwa nelayan tersebut tidak menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Pemerintah dalam memberdayakan para nelayan dalam katagori miskin.

4.4.1.1. Strategi Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan

Alat tangkap adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya, alat tangkap ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu, kait, benang pancing, pemberat, batang pancing, roda pancing, umpan, indikator gigitan, tombak, jaring ikan, jebakan ikan. Pemberian alat tangkap dan boat sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan, karena alat pancing sendiri merupakan hal pokok yang utama yang dibutuhkan para nelayan setelah boat. Alat tangkap juga sangat

diperlukan untuk meningkatkan keuntungan para nelayan, dan alat tangkap yang di berikan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para nelayan tersebut sehingga hasil yang didapatkannya juga menjadi maksimal.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa alat tangkap dan boat untuk nelayan miskin. Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan bantuan tersebut, nelayan hanya membuat kelompok dengan jumlah 12 orang dan mengajukan proposal ke pusat untuk meminta bantuan, kemudian bantuan akan disalurkan kepada para nelayan dengan beberapa alat tangkap lengkap dan 6 (enam) boat untuk satu kelompok. Bantuan diberikan kepada nelayan dengan perantara penerima bantuan, penerima bantuan akan melihat dan memilih nelayan mana saja yang pantas dan layak untuk mendapatkan bantuan, kemudian para nelayan membuat proposal yang akan diajukan ke dinas dan setelah itu barulah bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat nelayan , sebelumnya diadakan sosialisasi bagi para nelayan yang mendapatkan bantuan dengan cara mengajari penggunaan alat bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sosialisasi yang diberikan hanya sekali sebelum penyerahan bantuan dan setelahnya tidak ada sosialisasi atau pengawasan kembali.

Pemberian bantuan yang diberikan bersifat bergilir yaitu dimana semua Gampong yang ada disekitaran Muara Batu akan bergilir mendapatnya, tidak hanya satu kelompok saja yang terus-menerus mendapatkannya. Kemudian pula sifat bantuan yang diberikan kepada nelayan bersifat hibah, semua alat pancing dan boat yang telah diberikan kepada nelayan maka menjadi hak nelayan sepenuhnya untuk menggunkan tanpa harus mengembalikannya kembali. Setiap tahunnya dari pemerintah akan meminta data-data nelayan di Gampong untuk diberikan bantuan alat tangkap dan Boat.

Kemudian strategi ini sangat penting untuk para nelayan dalam mengembangkan dirinya dalam mendapatkan keuntungan dari pemberian alat pancing tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari nelayan yang sudah berkembang dan mendapatkan keuntungan lebih, misalnya tidak perlu berbagi hasil dengan Toke Bangku, semua keuntungan yang didapatkan hanya akan dipergunakan untuk dirinya saja. Ini adalah salah satu fakta yang bisa kita lihat dari berhasilnya strategi pemberian alat tangkap kepada nelayan miskin. Untuk Pemerintah juga harus lebih melihat kembali apa saja yang dibutuhkan para nelayan selain berupa alat tangkap dan boat, lebih memberikan strategi gambaran baru dalam menangkap ikan dan

mengasikkan ikan yang lebih banyak kedepannya dan bisa mensejahterakan para nelayan miskin yang ada di keude bungkaih.

4.5 Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat Nelayan

4.5.1 Hambatan Internal

4.5.1.1 Jumlah Bantuan dan Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi dimasa yang akan datang, seluruh kegiatan perusahaan/instansi untuk jangka waktu tertentu. Salah satu hambatannya yaitu kurangnya anggaran yang disalurkan oleh pemerintah untuk para nelayan.

Bantuan yang diberikan hanya untuk beberapa kelompok saja yang terdiri dari beberapa orang misalnya dua atau tiga kelompok saja, selebihnya masih banyak masyarakat nelayan yang tidak kebagian dalam pemberian bantuan tersebut, masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah tapi sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Kemudian untuk penerimaan bantuan yang diberikan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya, alat pancing yang diberikan bukan alat pancing dengan merek yang bagus tapi dengan merek kualitas yang kurang baik dan juga ukuran yang diinginkan oleh pemancing dan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama sangat berbeda.

Bantuan yang diberikan tidak bisa merangkul semua nelayan yang ada, hal tersebut dikarenakan bantuan yang diberikan tidak hanya berpusat pada suatu kecamatan atau gampong saja tapi seluruh kabupaten Aceh Utara, makanya menyebabkan banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan, dari hasil penelitian juga bisa dilihat bahwa pemberdayaan yang diberikan menyeluruh untuk semua dan bergilirir tidak semuanya mendapatkan bantuan tapi harus menunggu giliran mendapatkan bantuan tersebut.

4.5.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik instansi maupun perusahaan pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi

tersebut. Hambatan yang dialami oleh instansi salah satunya yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bagi perusahaan atau instansi dalam upaya mengembangkan perusahaannya. Dalam proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin para staf yang bekerja dibagian tersebut sangat kewalahan karena kurangnya SDM yang bekerja dibagian pemberdayaan masyarakat miskin. Tugas yang dikerjakan lebih banyak dari staf yang bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan akhirnya menjadi tidak efisien.

Pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa alat pancing, boat dan alat tangkap, sebelum pihak dinas memberikan bantuan tersebut mereka mengadakan sosialisasi kepada para nelayan yaitu tata cara penggunaan alat pancing yang benar dan itu semua dilakukan oleh staf yang bekerja dibagian perkantoran karena kurangnya tim pengawasan lapangan. Sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh kepada pengawasan yang kurang optimal, hanya pengawasan dilakukan ketika pemberian bantuan tersebut, kurangnya SDM tersebut sangat berpengaruh penting terhadap pengawasan.

4.5.1.3 Kurangnya pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, pengawasan juga proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan sangat di perlukan oleh dinas kelautan, salah satu kendala yang di hadapi yaitu kurangnya pengawasan setelah memberikan bantuan boat dan alat tangkap.

Banyak nelayan yang melakukan kecurangan setelah mendapatkan bantuan, seperti tidak menggunakan alat yang diberikan oleh pemerintah dan menjualnya dengan keperluan pribadi, dan uang tersebut dibagikan rata masing-masing nelayan. Oleh karena itu pengawasan terhadap sangat penting untuk dilakukan, apabila setiap mendapatkan bantuan selalu di jual maka nelayan tidak akan berkembang dan pendapatan ekonomi juga tidak meningkat, hal itu

disebabkan ketergantungan nelayan dengan Toke Bangku sehingga hasil atau pendapatan yang didapatkan harus di bagi dengan Toke Bangku, selain itu juga pemerintah ingin membantu

ketergantungan tersebut, tetapi tidak tercapai karena tidak adanya pengawasan.

4.5.2 Hambatan Eksternal

4.5.2.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran sama artinya dengan mawas diri, kesadaran juga diartikan sebagai kondisi dimana individu memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun eksternal. Serta kendala lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat harus punya keinginan dalam menggunakan atau mempergunakan bantuan yang diberikan. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa alat tangkap dan boat, seterusnya kembali kepada Nelayan itu sendiri bagaimana cara menggunakan bantuan yang telah diberikan. Seperti banyak nelayan yang menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah, keinginan pemerintah supaya para nelayan miskin berkembang dan terpedaya akan sia-sia apabila nelayan sendiri tidak punya motivasi dan keinginan yang besar untuk berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan bantuan tersebut.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat diperlukan supaya strategi yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Ketika pemerintah sudah membantu mengayomi para nelayan dengan memberikan bantuan alat tangkap dan boat, maka dari pihak masyarakat juga harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik, bukannya dengan menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah, karena Pemerintah hanya bisa membantu dari luar selebihnya balik lagi kepada pribadi masyarakat nelayan tersebut.

4.5.1.2 Kurangnya partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menanggapi masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok.

Keikutsertaan masyarakat dalam ikut dalam proses pemberian bantuan adalah hal utama yang sangat diinginkan oleh masyarakat nelayan, tapi yang terjadi adalah banyak masyarakat nelayan yang tidak bisa berpartisipasi dalam hal tersebut karena kuota yang

diberikan oleh pemerintah sangat terbatas dan hanya untuk orang-orang tertentu saja untuk orang yang terplih dan layak mendapatkan bantuan. Apabila melihat langsung dari masyarakat nelayannya semua diantara mereka ingin ikut berpartisipasi dalam pembuatan proposal sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi hal tersebut bisa dicapai oleh sebagian masyarakat nelayan karena bermasalah pada jumlah kuota yang ditawarkan oleh pemerintah sangat minim.

*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pemerintah dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa alat tangkap dan boat kepada nelayan, strategi tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatkan hasil tangkapan para nelayan, sehingga sangat membantu para nelayan dan bisa mensejahterakan nelayan pada umumnya.
2. Hambatan internal yaitu kurangnya jumlah bantuan dan anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, serta kurangnya pengawasan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat.

5.2 saran

Sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam hasil penelitian dilapangan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan, pemerintah harus benar benar melihat strategi yang paling cocok untuk para nelayan meningkatkan kesejahteraan pemerintah harus meningkatkan pemberian bantuan berupa alat tangkap dan boat kepada para nelayan dan juga harus memberikan bantuan berupa modal usaha, karena banyak juga nelayan yang membutuhkan perkembangan dalam meningkatkan hasil yang maksimal.
2. Dari factor hambatan internal ada kurangnya jumlah bantuan dan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan disini pemerintah harus meningkatkan lagi sistem pengawasan dalam distribusi bantuan dan pengawasan dalam pemanfaatan bantuan oleh nelayan

penerima bantuan. Dari faktor hambatan eksternal ada kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat, pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi motivasi untuk para nelayan agar nelayan memiliki kesadaran dan keinginan untuk berkembang dan mandiri dalam mensejahterakan hidupnya.

*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambar Teguh S, (2004). *Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Kampung*, Tim Laperia Pustaka Utama Jakarta
- Assaury, Sofyan, 1993 *Dasar Konsep dan Strategi*, LPFE, 1V, Jakarta.
- Februana, Ngarto. *Manual Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah*, Banda Aceh: International Organization for Migration, 2008.
- Friedman, Marilyn M. 1992. *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debora Ina R.L. 1998 (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Hanna, robinson, Hikmat, (2006), *Pengaruh Utama Partisipasi Masyarakat*, C.V. Cepruy, Jakarta.
- Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Penerbit PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartiko, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Rineka Cipta. Kusnadi. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. 2000. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara.
- Leibo, Jefta. 1995. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Andi offset.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CVSinar Bakti , 1988, h.256
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta, BPEF.

- Setiana, lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Soekartawi. 1998. *Prinsip Dasar: Komunikasi Pertanian*, UI Press, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryabrata,sumadi. 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: rajawali pers
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wrihatnolo, Dwijowijoto, (2007). *Administrasi Program Dan Proyek Pembangunan*, IKIP, Malang.
- Yusuf. 2003. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta, P3PK, Universitas Gajah Mada

Skripsi

- Mursidah. (2016) *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Gampong Pusong Kecamatan Banda Sakti*, Skripsi. FISIP Unimal.
- Hasan. M, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Daerah Pesisir Kecamatan Blang Mangat*, Skripsi. FISIP Unimal.

WEB

<http://dhonypratama.com/upah-minimum-regional-2013>

<http://klhacehutara.blogspot.co.id/2011/07/laut-pesisir-dan-pantai-aceh-utara.html>

<http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>

<http://wargamasyarakat.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-masyarakat-pesisir.html>

<http://zarifah91.blogspot.co.id/2013/05/masyarakat-pesisir.html>

https://carapedia.com/pengertian_definisi_masyarakat_menurut_para_ahli_info488.html

RIWAYAT PENULIS

Indonesia dengan potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan, terutama masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan (2015), bahwa 121,76 juta orang atau 46 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS 2015), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 35,83 juta orang (15,27 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (62,52 persen) penduduk miskin di Indonesia berada didaerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2015). Berdasarkan jumlah penduduk miskin yang masih sangat besar sebagaimana yang disebutkan diatas maka sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat Nelayan.

Di lain sisi Indonesia memiliki total luas laut sekitar 3,544 juta km² dan memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya. Diperkirakan pendapatan dari sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun, perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil karena mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut; 0,47 juta nelayan perairan umum; dan 2,65 juta pembudi daya ikan.

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-075-0

